

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul yang diambil, terdapat beberapa acuan dari peneliti terdahulu sebagai referensi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jovan R. Tamon, Jullie J. Sondakh, dan Lidia M. Mawikere yang berjudul "*Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado*". Jurnal ini membahas tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAK ETAP dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013. Hasil dari jurnal tersebut adalah dalam penyajian laporan keuangan BPRS Cipta Cemerlang Indoneia (CCI) Manado masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak diterbitkan, sementara menurut SAK ETAP dan PBI wajib diterbitkan, seperti persediaan, properti investasi, dan kewajiban diestimasi, dan masalah tenaga kerja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati, A. Abd. Azis Ishak yang berjudul "*Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negri Ujung Pandang*". Jurnal ini membahas tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan akuntansi aset tetap dengan PSAP No. 07. Hasil dari penelitian

tersebut adalah masing masing variabel (pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan akuntansi asset tetap) telah sesuai dengan PSAP No.07.

3. Penelitian yang dilakukan oleh L. P. Novyanti Ciptana Ika Putri, I D. G. Dharma Suputra, I Ketut Budiarta yang berjudul "*Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dengan Penerapan Pedoman Akuntansi Sebagai Variabel Pemediasi*". Jurnal ini membahas tentang pengaruh penerapan SAK ETAP pada kinerja keuangan BPR dengan penerapan PA-BPR dan mengambil sample sebanyak 28 BPR dengan 91 responden di Kabupaten Gianyar. Hasil dari jurnal tersebut adalah penerapan SAK ETAP berpengaruh pada kinerja keuangan BPR di Kabupaten Gianyar dengan penerapan PA-BPR sebagai variabel mediasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Immu Puteri Sari dan Dwi Nova Azana yang berjudul "*Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada PT. BPR Ganto Nagari 1945*". Jurnal ini membahas tentang bagaimana penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam neraca pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 Lubuk alung pada tahun 2015. Hasil dari jurnal tersebut adalah penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP terdapat tiga pokok kebijakan akuntansi yang berlaku dalam neraca adalah tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos-

pos yang ada pada neraca. Hasil pernyataan dari orang bagian keuangan PT. BPR Ganto Nagari 1945 terdapat 126 pernyataan yang diantaranya ada beberapa pernyataan yang belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1954 yang terdiri atas 6 item pengakuan, 4 item penyajian dan 5 item pengungkapan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Peggy Natasia Manegeng, Jullie J.Sondakh, Rudy J. Pusung yang berjudul "*Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan menurut SAK ETAP pada PT.Metta Karuna Jaya*". Jurnal ini membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan pada PT. Metta Karuna Jaya dengan standar yang berlaku SAK ETAP. Hasil dari jurnal tersebut adalah PT. Metta Karuna Jaya telah memahami dan menerapkan konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan berdasarkan SAK ETAP dengan baik. Metode pengakuan pendapatan PT. Metta Karuna Jaya berdasarkan metode accrual basic, pengukuran pendapatan berdasarkan jumlah penghasilan yang berasal dari penjualan produk perusahaan, kemudian pengungkapan pendapatannya dalam laporan laba rugi tahunan perusahaan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Anggelina Chrisdayanti Salindeho, Lintje Kalangi, Sonny Pangerapan yang berjudul "*Perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT Bank*

Mandiri”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan dan beban pada Laporan Keuangan Koperasi Karya Sampurna PT Bank Mandiri berbasis SAK ETAP. Hasil dari jurnal ini adalah perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. Bank Mandiri sudah sesuai dengan SAK ETAP dilihat dari pengakuan, pengukuran dan pencatatannya. Namun dalam penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP karena pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna menggunakan istilah biaya sedangkan SAK ETAP menggunakan istilah beban dan Koperasi Karyawan Karya Sampurna juga tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan

7. Penelitian yang dilakukan oleh erlinasari, Linda Tria yang berjudul “*Analisis Penerapan SAK ETAP pada PT Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR Surya Abadi Bersaudara)*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana penerapan SAK ETAP pada PT BPR Surya Abadi Bersaudara. Hasil dari penelitian ini adalah pada BPR tersebut hanya menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan dalam SAK ETAP laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan penjelasan informasi lainnya

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Sari yang berjudul "*Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP pada koperasi inti Bandung*". Jurnal ini membahas tentang kesesuaian penyusunan laporan pada koperasi inti Bandung dengan SAK ETAP. Hasil dari penelitian ini adalah koperasi inti Bandung telah menggunakan standar yang ada dalam penyusunan laporan keuangan yaitu SAK ETAP".
9. Penelitian yang dilakukan oleh Friska Frilisia, I Gde Ary Wirajaya yang berjudul "*Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Aira Nusantara Indah*". Jurnal ini membahas tentang analisis penyajian laporan keuangan dengan standar SAK ETAP pada PT. Aira Nusantara Indah. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Aira Nusantara Indah hanya melakukan proses pencatatan dengan membuat jurnal khusus yang terdiri atas catatan penerimaan dan pengeluaran kas, catatan piutang, catatan penjualan, dan kartu persediaan barang dagangan, namun catatan yang dibuat oleh perusahaan tersebut belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan pemilik dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Setyaningsih yang berjudul "*Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada koperasi simpan pinjam syariah (KSPS)*". Jurnal ini membahas tentang kajian KSPS Makmur

Batang dalam menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hasil dari penelitian tersebut adalah laporan keuangan KSPS Makmur Batang belum sesuai SAK ETAP, seperti penyajian kebijakan akuntansi hanya mengacu UU Perkoperasian Pasal 37 ayat (1) dan hanya menyajikan secara komparatif untuk laporan neraca. Tidak menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang**

No	Jurnal/Skripsi	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
1	Jovan R. Tamon, Jullie J. Sondakh, dan Lidia M. Mawikere. 2016, dengan judul “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado”.	Lokasi: Manado Metode: Deskriptif Kualitatif Teknik pengumpulan data: Wawancara. Substansi: Kajian terkait evaluasi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan aturan SAK ETAP dan PBI Nomor 15/3/PBI/2013 Objek: Laporan keuangan BPR CCI Manado	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
2	Rosmawati, A. Abd. Azis Ishak. 2017, dengan judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset tetap berdasarkan PSAP	Lokasi: Makassar Metode: Deskriptif Kualitatif Teknik pengumpulan data: Wawancara dan data sekunder (laporan keuangan, daftar asset) Substansi: Penerapan	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan

	No.07 pada Politeknik Negri Ujung Pandang”.	PSAP No.7 pada pengakuan pengukuran pengungkapan dan penyajian laporan keuangan PNUP Objek: Aset tetap milik negara yang dipergunakan PNUP	SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
3	L. P. Novyanti Ciptana Ika Putri, I D. G. Dharma Suputra, I Ketut Budiarta. 2015, dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dengan Penerapan Pedoman Akuntansi Sebagai Variabel Pemediasi”.	Lokasi: Bali Metode: Kuantitatif Teknik pengumpulan data: Survey, Kuisisioner Substansi: Kajian terkait pengaruh SAK ETAP pada kinerja keuangan BPR Objek: Seluruh BPR di Kabupaten Gianyar	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
4	Immu Puteri Sari dan Dwi Nova Azana, 2017, dengan judul “Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada PT. BPR Ganto Nagari 1945”.	Lokasi: Padang Pariaman Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Wawancara dan Laporan Keuangan PT. BPR Ganto Nagari 1945 Substansi: Kajian terkait penyusunan laporan keuangan PT. BPR Ganto Nagari 1945 dengan acuan SAK ETAP Objek: PT. BPR Ganto Nagari 1945	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera

5	Peggy Natasia Manegeng, Jullie J.Sondakh, Rudy J. Pusung, 2017, dengan judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan menurut SAK ETAP pada PT.Metta Karuna Jaya”.	Lokasi: Makassar Metode: Kualitatif Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi (pengumpulan data laporan keuangan). Substansi: Kajian terkait penerapan SAK ETAP pada pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan PT Metta Karuna Jaya. Objek: PT Metta Karuna Jaya	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
6	Angelina Chrisdayanti Salindeho, Lintje Kalangi, Sonny Pangerapan, 2018, dengan judul “Perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT Bank Mandiri”.	Lokasi: Manado Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Wawancara Substansi: Kajian terkait Perlakuan akuntansi pendapatan dan beban pada laporan keuangan dengan aturan SAK ETAP Objek: Koperasi Karya Sampurna PT Bank Mandiri	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
7	Erlinasari, Linda Tria, 2012, “Analisis Penerapan SAK ETAP pada PT Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR Surya Abadi Bersaudara”	Lokasi: Malang Metode: Kualitatif Teknik pengumpulan data: Wawancara Substansi: Kajian terkait penerapan SAK ETAP pada PT BPR Surya Abadi Objek: PT BPR Surya	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap



		Abadi	pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
8	Nurlaila Sari, 2015, dengan judul “Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAK ETAP pada Koperasi Inti Bandung”.	Lokasi: Bandung Metode: Kualitatif Teknik pengumpulan data: Wawancara Substansi: Kajian tentang kesesuaian laporan keuangan Koperasi Inti Bandung dengan standar yang ada yaitu SAK ETAP Objek: Koperasi Inti Bandung	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
9	Friska Frilisia, I Gde Ary Wirajaya, 2018, dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Aira Nusantara Indah”.	Lokasi: Bali Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Wawancara, Observasi, Dokumentasi Substansi: Kajian tentang penerapan SAK ETAP pada PT Aira Nusantara Indah Objek: PT Aira Nusantara Indah	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera

10	Ida Ayu Setyaningsih, 2015, dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada koperasi simpan pinjam syariah (KSPS)”.	Lokasi: Semarang Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Wawancara Substansi: kajian tentang penerapan SAK ETAP pada KSPS Objek: KSPS Makmur Batang	Lokasi: Bantul Metode: Kualitatif Deskriptif Teknik pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka. Substansi: Penerapan SAK ETAP terhadap pengungkapan dan penyajian laporan keuangan serta kualitasnya pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Objek: BPRS Madina Mandiri Sejahtera
----	---	--	--

## B. Landasan Teori

### 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

#### a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, disebutkan BPRS merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Hal yang mendasar terkait kesyariahan

BPRS yaitu terhindar dari unsur Riba, Maisir, Gharar. (Yusuf, 2016:249)

b. Tujuan pendirian BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
  - 2) Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi
  - 3) Meningkatkan pendapatan perkapita
  - 4) Menghimpun dana masyarakat dan melayani kebutuhan modal dengan prosedur pembiayaan yang mudah dan sederhana.
- (Sudarsono, 2003:85)

c. Kegiatan usaha BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai Lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan pada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat berupa:
  - a) Simpanan berupa tabungan dengan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b) Investasi berupa deposito dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah
    - b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli berdasarkan akad Murabahah, Salam dan Istishna
    - c) Pembiayaan dengan akad Qardh
    - d) Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa berdasarkan akad Ijarah dan Ijarah Munttahiya Bittamlik
    - e) Pengambilalihan hutang berdasarkan akad Hiwalah
  - 3) Menempatkan dana pada Bank lain dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit, dan tabungan.
  - 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah. (UU No.21 Tahun 2008 pasal 21)
- d. Kegiatan usaha BPRS yang dilarang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang untuk:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- 4) Melakukan penyertaan modal
- 5) Melakukan usaha perasuransian
- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha BPRS (UU No.21 Tahun 2008 pasal 25)

## 2. Landasan hukum akuntansi

Dalam pencatatan akuntansi syariah berpedoman pada Al-Quran surat Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Maksud dari ayat tersebut bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia yang bermuamalah haruslah selalu melakukan pencatatan terhadap transaksi yang bersifat tidak tunai. Dalam ayat ini mengandung beberapa nilai antara lain:

- a. Pencatatan dilakukan sebenar benarnya
- b. Pencatatan dilakukan dengan jujur dan apa adanya
- c. Pencatatan dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya

- d. Setiap transaksi harus dicatat baik ukuran besar maupun kecil
- e. Menggunakan bukti transaksi yang kuat, adil dan tidak menyulitkan (Sitompul, 2016:207)

### **3. Asas dan karakteristik transaksi syariah**

Transaksi syariah berasaskan pada beberapa prinsip yaitu prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), kemaslahatan (masalahah), keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliyah).

#### **a. Prinsip persaudaraan (ukhuwah)**

Dalam prinsip ini menata harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Sehingga transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan seseorang tidak boleh mendapat keuntungan atas kerugian orang lain. Dalam prinsip persaudaraan ini meliputi saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliasnsi.

#### **b. Prinsip keadilan ('adalah)**

Dalam prinsip ini artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu pada posisinya. Hal hal yang dilarang adalah:

- 1) Bunga dalam segala bentuk jenisnya karena mempunyai unsur riba. Riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang

dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang jumlahnya tidak pasti atau berubah ubah sewaktu waktu.

- 2) Unsur yang merugikan atau zalim, artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Hal ini dapat menimbulkan kemudharatan.
- 3) Judi atau maisyir yaitu setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktifitas.
- 4) Unsur ketidakjelasan atau gharar yaitu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
- 5) Haram baik barang maupun jasa serta aktivitas operasionalnya yang bertentangan dengan prinsip prinsip syariah.

c. Prinsip kemaslahatan (mashlahah)

Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni halal serta bermanfaat dan membawa kebaikan. dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi Syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan Syariah yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- 1) Akidah, keimanan dan ketaqwaan

- 2) Akal
- 3) Keturunan
- 4) Jiwa dan keselamatan
- 5) Harta benda

d. Prinsip keseimbangan (tawazun)

Transaksi Syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

e. Prinsip universalisme (syumuliyah)

Dalam prinsip ini yaitu dalam bertransaksi dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya maupun golongannya. (SAK ETAP 2015)

Transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rela atau ridha.



- b. Prinsip kebebasan bertransaksi selama objek transaksinya halal atau baik.
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba
- e. Tidak mengandung unsur zalim
- f. Tidak mengandung unsur gharar
- g. Tidak mengandung unsur maisyir
- h. Tidak mengandung unsur haram
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang benar dan di sepakati kedua belah pihak (akad) serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lainnya.
- k. Tidak ada unsur suap menyuap
- l. Transaksi Syariah komersial dilakukan, antara lain, berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
- m. Transaksi Syariah nonkomersial dilakukan, antara lain, berupa pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh) serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. (SAK ETAP 2015)

#### **4. Laporan Keuangan**

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan Keuangan merupakan informasi keuangan suatu entitas yang dibuat setiap akhir periode. Laporan keuangan pada suatu entitas harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. (Kasmir, 2008:6)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 7/47/PBI/2005 dalam transparansi keadaan keuangan, BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan wujud dan cakupan antara lain:

1) Laporan Tahunan

- a) Neraca
- b) Laba rugi
- c) Arus kas
- d) Perubahan ekuitas
- e) Perubahan dana investasi terikat, jika ada
- f) Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi komitmen dan kotinjensi
- g) Sumber dan penggunaan dana Qardh
- h) Sumber dan penggunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah

2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- a) Neraca
- b) Laba rugi

- c) Komitmen dan kontinjensi
- d) Sumber dan penggunaan dana ZIS serta sumber dan penggunaan dana Qardh
- e) Perubahan dana investasi terikat (bulan maret dan September cukup sampai point ke 3)

Laporan keuangan publikasi disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan ditandatangani oleh direksi BPRS dengan mencantumkan nama terang. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

b. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009:2)

c. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan

Agar informasi laporan keuangan mudah digunakan oleh pihak eksternal maupun internal dalam pengambilan keputusan dalam bentuk investasi, kredit maupun keputusan yang lainnya, maka dibutuhkan karakteristik dari laporan keuangan tersebut, yaitu:

- 1) Dapat dipahami oleh pengguna terkait informasi laporan keuangan yang diberikan.
- 2) Relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan agar membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 3) Materialitas yaitu pos pos yang jumlahnya material disajikan sendiri dalam laporan keuangan, namun dapat digabungkan dengan yang tidak material sepanjang memiliki fungsi yang sejenis.
- 4) Keandalan dalam penyajian laporan keuangan harus berkualitas maksimal dan bebas dari kesalahan material yang dapat membiaskan pengambilan keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hal tertentu.
- 5) Substansi mengungguli bentuk, yaitu transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
- 6) Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

- 7) Kelengkapan informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
- 8) Dapat dibandingkan, yaitu pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
- 9) Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Tidak boleh ada penundaan agar tetap relevan.
- 10) Keseimbangan antara biaya dan manfaat, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009:2-5)

d. Keterbatasan laporan keuangan

Laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain:

- 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

- 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna.
- 3) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- 4) Menggunakan pertimbangan materialitas.
- 5) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansi dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya

#### **5. Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan**

- a. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan diikuti pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk penyajian laporan keuangan dengan pedoman SAK ETAP meliputi neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, perubahan arus kas, rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, catatan atas laporan keuangan.
- b. Pengungkapan adalah langkah akhir dari proses akuntansi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos akun dari aktivitas akuntansi. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan BPRS. (Neliana, 2017:14)

#### **6. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**

a. Pengertian SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) SAK ETAP adalah standar akuntansi yang digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang dimaksud entitas tanpa akuntabilitas public adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Diantaranya adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan Lembaga pemeringkat kredit.

Kelahiran SAK ETAP memberikan manfaat bagi BPRS dimana dalam penyajian informasi keuangan tidak menggunakan SAK UMUM lagi. Konsep SAK ETAP lebih ringan dan memudahkan perusahaan dalam membuat laporan keuangan. SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas public dengan kategori:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas public signifikan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contohnya adalah kreditur, pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, Lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP juga boleh digunakan oleh entitas yang mempunyai akuntabilitas public signifikan selama diizinkan oleh otoritas yang berwenang. Kategorinya adalah

- 1) Entitas mengajukan atau masih pada proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
  - 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai Lembaga fidusia bagi sekelompok besar masyarakat seperti bank, asuransi, dana pension, pedagang efek, reksadana dan bank investasi.
- b. Penyusunan laporan keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia penyusunan laporan keuangan pada BPRS berdasarkan SAK ETAP 2015 meliputi:

1) Neraca

Dalam laporan keuangan neraca menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal setiap akhir periode. Pos pos yang ada pada neraca yaitu:

- a) Piutang usaha dan piutang lainnya
- b) Kas dan setara kas
- c) Property investasi
- d) Persediaan
- e) Aset tidak berwujud
- f) Aset tetap
- g) Aset serta kewajiban pajak
- h) Kewajiban diestimasi



- i) Utang usaha dan utang lainnya
  - j) ekuitas
- 2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang didalamnya terdapat pos pendapatan dan beban yang diakui pada suatu periode tertentu.

- a) Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham
- b) Keuntungan adalah pos pendapatan lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank.
- c) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham.
- d) Kerugian adalah pos beban lain yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Bank
- e) Pendapatan dan beban operasional adalah pendapatan dan beban dari kegiatan usaha Bank

f) Pendapatan dan beban nonoperasional adalah pendapatan dan beban di luar kegiatan usaha Bank.

Dalam laporan ini harus mencakup pos pos yang berkaitan dengan pendapatan atau beban sehingga muncul hasil laba rugi tersebut. Pos pos yang dicakup dalam laporan laba rugi adalah:

- a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank termasuk pendapatan dari jual beli, pendapatan bagi hasil, pendapatan usaha utama lain, pendapatan sewa.
  - b) Pendapatan usaha lain
  - c) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer
  - d) Beban usaha
  - e) Laba usaha
  - f) Pendapatan non usaha
  - g) Beban non usaha
  - h) Beban pajak penghasilan
  - i) Laba neto
- 3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas Bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode pelaporan. Kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan

jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Bank selama periode pelaporan. Dalam laporan ini meliputi:

- a) Modal saham, misalnya ada penambahan modal saham
  - b) Dana setoran modal
  - c) Saldo laba (laba ditahan)
  - d) Surplus revaluasi aset tetap
- 4) Laporan arus kas

Dalam laporan ini menyajikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas BPRS pada periode tertentu yang dikelompokkan dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

- a) Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Bank dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
- b) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas
- c) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman Bank.
- d) Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum

- e) Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek

5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Dalam laporan ini berisi pendapatan bank berbasis akrual dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik modal berbasis kas. Hal hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Rincian pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang diterima di periode berjalan.
- b) Rincian pendapatan usaha utama periode berjalan yang belum diterima kas atau setara kasnya.
- c) Rincian pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Dalam laporan ini berisi sumber dan penyaluran dana zakat kepada Lembaga pengelola zakat dan juga saldo yang belum tersalurkan pada tanggal tertentu. Komponen laporannya meliputi:

- a) Sumber dana zakat dari internal bank dan eksternal bank
- b) Penyaluran zakat kepada Lembaga pengelola zakat
- c) Kenaikan atau penurunan dana zakat
- d) Saldo awal dana zakat

e) Saldo akhir dana zakat

7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Dalam laporan ini berisi sumber serta penggunaan dana kebajikan, dan juga saldo dana kebajikan yang belum disalurkan. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional yang juga dimasukkan dalam kategori dana kebajikan.

Laporan ini satu komponen Laporan Keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Bank yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas Bank dalam mengelola dana kebajikan. Komponen laporan keuangannya meliputi:

- a) Sumber dana kebajikan dari penerimaan sedekah, infaq, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, penerimaan non halal.
- b) Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan untuk kepentingan umum lainnya
- c) Kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan
- d) Saldo awal dana kebajikan
- e) Saldo akhir dana kebajikan

#### 8) Catatan atas laporan keuangan

Laporan ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan mengenai gambaran umum Bank, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pospos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. laporan ini harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan
- b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- c) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. (SAK ETAP 2015)